



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

**BADAN KESBANGPOL & PBD
KOTA SAWAHLUNTO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja Perubahan ini merupakan tekad dan janji yang berisi Rencana Tahunan yang akan dicapai oleh pemegang jabatan setruktural di setiap Organisasi Perangkat Daerah, dalam wujud program dan kegiatan yang bersifat strategis dan prioritas.

Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan ini disebabkan adanya perubahan Anggaran pada DPA OPD Badan Kesbangpol PBD, sehingga dengan demikian juga berpengaruh terhadap Perjanjian Kinerja OPD, dengan demikian Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi kontrak kerja yang harus direalisasikan oleh pemegang jabatan sebagai penerima amanah dan pada akhir Tahun Anggaran akan dijadikan sebagai dasar Evaluasi dan Penilaian Pencapaian Kinerja.

Demikian kami sampaikan, semoga Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman dan direalisasikan sebagaimana yang diharapkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sawahlunto, November 2021

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 190003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG	1
2. LANDASAN HUKUM	2
3. RUANG LINGKUP	3
4. FORMAT PERJANJIAN KINERJA	4
5. SISTEMATIKA PENULISAN	6

BAB II. ORGANISASI

1. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN	11

BAB III. RENCANA STRATEGIS DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS / RENSTRA	16
2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RENJA)	24

BAB IV. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....28

BAB V. PENUTUP

1. KESIMPULAN.....	29
2. SARAN.....	30

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SKPD (Anak Lampiran IA1/2-6)
- TABEL PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2021 (Anak Lampiran I/5-6)
- TABEL DAFTAR LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 (PERUBAHAN)
- STRUKTUR BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa Penyusunan Perjanjian Kinerja harus dibuat oleh seluruh tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dirasa perlu dibahas dan dicarikan solusinya adalah bagaimana kita melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas kinerja, baik secara kelembagaan maupun kinerja personil beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan parameter ukuran yang akan dipergunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara Kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala (Triwulan) dan Tahunan. Pengukuran dan

pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan dan atau kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada pimpinan atau Aparatur Sipil Negara di bawahnya untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sebagaimana yang yang tercantum pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021 dan Peraturan Walikota nomor 70 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Unit Kerja yang menerima tanggung jawab tersebut. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat struktural.

2. LANDASAN HUKUM

Beberapa Peraturan Perundangan yang menjadi Landasan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang tersedia, dinamika masyarakat dan kondisi lingkungan. Ruang lingkup Perjanjian Kinerja ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama yang merupakan Program Prioritas yaitu program program yang dapat menggambarkan skala prioritas dari tugas dan urusan wajib yang menggambarkan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dan isu strategis yang sedang berkembang.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

4. FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Format Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu, yang mengalami perubahan khususnya alokasi anggaran.

2. Lampiran berisi antara lain:

a. Sasaran strategis

Merupakan pernyataan strategis OPD sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis OPD

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan dan pencapaian hasil suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa input, output, outcome, maupun benefit yang dapat dicapai.

c. Target Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.

d. Program-program

Program-program yang menggambarkan keberadaan (eksistensi) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto. Perumusan program utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, jika dipandang perlu, maka dimungkinkan setiap unit kerja untuk merumuskan sub program tersendiri.

e. Kegiatan – kegiatan

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan merupakan rincian Program yang diuraikan berdasarkan kebutuhan tugas dan hal – hal yang sifatnya strategis dan prioritas untuk dilaksanakan guna menindaklanjuti Rencana Strategis yang telah disusun.

f. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut, data ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perjanjian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, ruang lingkup, format perjanjian kinerja dan sistematika penulisan

BAB II. ORGANISASI

Menjelaskan secara ringkas kedudukan dan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi organisasi/OPD

BAB III. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Berisikan Rencana Strategis OPD 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

BAB IV. PERJANJIAN KINERJA

Berisikan pernyataan dan tabel perjanjian kinerja perubahan yang berisikan program utama, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja serta jumlah anggaran dialokasikan

BAB V. PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dan saran dari uraian – uraian dalam bab– bab sebelumnya.

BAB II

ORGANISASI

1. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan Organisasi Pelaksana dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Sawahlunto nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

1.a. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub bagian Administrasi Umum
 - b. Sub bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub bagian Administrasi Keuangan
4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik membawahi:
 - a. Sub bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat, dan
 - b. Sub bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - a. Sub bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan
 - b. Sub bidang kedaruratan dan logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub bidang Rehabilitasi
 - b. Sub bidang Rekonstruksi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

1.b. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto keadaan tanggal 02 Januari 2021 adalah sebanyak 66 orang. Aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menurut golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Komposisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol dan PBD Awal Tahun 2021											
Dan Oktober 2021 sebagai Pembandingan											
NO	Uraian	Keadaan Awal Januari 2021			Keadaan Per Oktober 2021			Bertambah/berkurang			Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan:										
	Gol IV	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0
	Gol III	10	5	15	10	4	14	1	0	1	1
	Gol II	7	2	9	7	2	9	-1	-1	-2	-2
	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PTT Wako	5	4	9	5	4	9	3	0	3	3
	PTT Kaban	26	2	28	26	2	28	2	1	3	3
	Jumlah	51	14	65	51	13	64	5	0	5	5

2.	Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan aparatur :	0	0	0	0	0	0	0	0
S3		0	0	0	0	0	0	0	0
S2		1	1	2	1	1	2	0	0
S1		14	8	22	14	8	22	1	3
DIV		0	1	1	0	0	0	0	-1
DIII		2	0	2	2	0	2	0	0
SLTA		32	4	36	32	4	36	4	4
SLTP		2	0	2	2	0	2	1	0
SD		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	51	13	64	51	14	65	5	6

Bila dilihat dari jumlah Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto pada kondisi 02 Januari 2021 terdapat perubahan komposisi Pegawai menurut golongan maupun tingkat pendidikan, hal ini disebabkan karena adanya CPNS baru, PNS yang pindah, pegawai yang naik golongan dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi demikian juga hal dengan kondisi per 30 Oktober 2021 juga terjadi perubahan jumlah ASN yaitu 2 orang memasuki masa purna bhakti, 4 orang pindah tugas serta 2 naik golongan.

2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka ketentuan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan kongkuren dan urusan pemerintahan umum.

Tugas yang terkait dengan Kesatuan Bangsa, Politik merupakan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dijelaskan pasal 25. Pada pasal 9 ayat (5) disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum dimaksud dijelaskan pada pasal 25 ayat (2), ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/walikota diwilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Untuk pembiayaan pemerintahan umum dibiayai oleh APBN ayat (5).Sementara ini sampai ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum dikeluarkan , maka tugas Kesatuan bangsa dan Politik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 122 yaitu :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sementara tugas yang terkait dengan tugas dibidang kebencanaan dijelaskan dalam pasal 117 yang berbunyi “Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penanggulangan bencana.

Untuk Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sama halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016 diatur dalam pasal 12 dan 13 .

- Pada pasal 12 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan . Dan untuk Anggaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada APBD.
- Pada pasal 13 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terakhir dirubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Perda dimaksud telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol dan PBD, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;

9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan, kebijakan teknis dibidang Ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat ;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Pemerintah telah menetapkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berpedoman pada landasan Idiil yaitu Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Sawahlunto.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan kondisi dan permasalahan, sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan umum, program dan rencana kerja menurut agenda dan rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto adalah bersifat makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah selama 5 tahun. RPJMD Kota Sawahlunto disusun untuk periode waktu tahun 2018 sampai dengan 2023.

Pembangunan di Kota Sawahlunto pada Tahun 2018 s/d 2023 akan diprioritaskan pada peningkatan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik, pengembangan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui industri kepariwisataan berbasis kegiatan industri kreatif, inovatif dan mengadakan pelatihan melalui BLK serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia beriman, kreatif dan inovatif/berdaya saing.

Pemerintah Daerah bertekad untuk melanjutkan pembangunan dibidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memupuk kehidupan yang religius serta membenahi pelayanan publik yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah, menyiapkan sarana dan prasarana BLK yang berkualitas sesuai standar, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan ketrampilan calon tenaga kerja, mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, memfasilitasi pembiayaan UMK diberbagai sektor potensial, memmantapkan penataan pasar tradisional dan menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional.

Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Dimana **Visi** adalah :

**“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI
KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT,
BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”.**

Sedangkan **Misi** untuk mewujudkan **Visi** adalah :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan Beasiswa dan Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan.
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas ,gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi dan Misi dan menangani isu strategis yang dihadapi dirumuskan tujuan dan tujuan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dengan indikator-indikator sasaran yang mempunyai tolak ukur. Dalam mencapai Misi yang tercantum pada RPJMD yang lebih memperjelas capaian-capaian SKPD yang dapat dilihat pada Matrik Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto.

Dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023, dapat ditelaah “ Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terumuskan

dalam Tujuan Pembangunan yang diterjemahkan pada Misi ke 7 dengan tujuan pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indicator sasaran dan strategi yaitu :

Misi 7 : Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai

Tujuan 1 : Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kesiagaan Kota dalam Antisipasi dan penanggulangan bencana.
7.1.2

Indikator : 1 Indeks Ketahanan Daerah (RPJMD)

Kinerja
Utama
(IKU) 2 Persentase masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan

3 Persentase masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana

4 Persentase Fasum yang tertangani pada saat pasca bencana

Strategi : 1 Peningkatan kapasitas masyarakat dan infastruktur dalam menghadapi bencana (Strategi pada Perubahan RPJMD)

2 Meniingkatkan kualitas perencanaan kebijakan penaggulangan bencana, peralatan logistic informasi kebencanaan, meningkatkan fungsi kelembagaan bencana dan SDM kebencanaan.

3 Meningkatkan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, fasilitas Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum di wilayah pasca bencana.

- 4 Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ekonomi social budaya dan psikologi di daerah pasca bencana.
- 5 Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.

- Arah : 1 Peningkatan ketersediaan seluruh dokumen perencanaan Kebijakan : penanggulangan bencana yang dibutuhkan (RPB, Renkon, Rencana Aksi, SOP Kebencanaan, Keakuratan data, dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada seluruh masyarakat.
- 2 Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu bencana di lokasi rawan bencana, peralatan, peningkatan dini bencana (early warning).
 - 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas personil relawan, kemampuan perencanaan dan kompetensi teknis penanganan bencana, SDM Aparatur penanggulangan bencana.
 - 4 Peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
 - 5 Peningkatan kesepakatan Kerjasama lintas instansi BUMN dan Perusahaan Swasta dalam penanganan bencana.
 - 6 Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat dengan instansi dan Lembaga terkait.
 - 7 Penyediaan dokumen kajian Jitu Pasma, perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pelaksanaannya di wilayah bencana.

8 Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah pasca bencana

A. Rumusan untuk tugas Penanggulangan Kebencanaan terletak pada :
dalam Tujuan Pembangunan yang diterjemahkan pada Misi ke-7 dengan Tujuan Pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indikator sasaran dan strategi yaitu :

- a. Rumusan Untuk Tugas Penanggulangan Kebencanaan terletak pada :
- b. Rumusan untuk Urusan Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik terletak pada:

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan inovatif.

Tujuan 4.2 : Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto.

Sasaran 4.2.1 : Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto .

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto .

Strategi : 1. Peningkatan moral, etika , tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.(RPJMD)
2. Pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
3. Membentuk dan melakukan pembinaan terhadap forum-forum strategis yang melibatkan masyarakat.
4. Membentuk forum-forum koordinasi yang melibatkan instansi terkait.
5. Meningkatkan pelayanan informasi agenda-agenda politik melalui diskusi politik Bersama tokoh politik,

masyarakat dan instansi terkait.

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap praktek - praktek politik yang betentangan dengan peraturan yang ada.

- Arah Kebijakan :
1. Memelihara heterogenitas budaya kehidupan bermasyarakat yang berwawasan kebangsaan.
 2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mencegah secara dini potensi konflik
 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 4. Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik
 5. Peningkatan pemahaman Parpol, Ormas, dan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No,86 Tahun 2017 `Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi Dasar dalam Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan : adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi, melaksanakan Misi dan menangani Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah diatas, telah ditetapkan tujuan dalam sasaran RENSTRA Badan Kesbangpol dan PBD yaitu :

1. Tujuan 1 : Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan
2. Tujuan 2 : Meningkatnya nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban Umum Masyarakat kota Sawahlunto

Sasaran : adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di-

Formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran dari Tujuan 1 tersebut adalah :

Terwujudnya kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana

Sasaran dari Tujuan 2 tersebut adalah

Menurunkan tingkat gangguan ,ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto

7. PROGRAM KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan perubahan Tahun 2021 sebagian mengalami perubahan hal ini disebabkan dalam rangka , melakukan efektivitas waktu pelaksanaan program/kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas dengan indikator kinerja capaian , output dan outcome sesuai dengan format tabel 4 berikut, dimana rencana Program yang diajukan berjumlah 5 program dengan 11 Kegiatan yang terdiri dari 24 sub kegiatan, dengan rincian :

1. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Bidang dalam Penanggulangan Bencana dengan 4 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Sub kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - b. Pengendalian operasi dan Penediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota
- b). Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi termasuk dalam 1 Program yang sama dengan Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan
 - a) Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan 1 Sub Kegiatan

a. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Bidang dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

b) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan :

a. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

4. Sekretariat terdiri dari 1 Program yang merupakan penunjang tugas dan fungsi Badan serta pelayanan Administrasi yaitu terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasi atau lapangan
 - b. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari 2 (Dua) sasaran strategi Generik yang terdiri dari :

1. Sasaran Strategis : dengan tolak ukur pencapaian indikator Tujuan/sasaran yang merupakan Sasaran yang terkait dengan Misi 7 RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu :“Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana ”
2. Sasaran Strategis dengan tolak ukur pencapaian indicator tujuan / sasaran yang merupakan sasaran yang terkait dengan misi 4 RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:”Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila”
3. Sasaran strategi yang merupakan sasaran strategi yang bersifat generik yang melekat dengan urusan pelayanan internal (Administrasi SDM, Perencanaan/Program dan Keuangan) OPD

Dari 2 (Dua) Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto diatas diimplementasikan dengan 5 Program yang diuraikan dalam 11 kegiatan dengan 25 sub kegiatan yang diukur pencapaiannya sebagai kinerja urusan OPD.

Perjanjian Kinerja dimaksud diuraikan pada Tabel Penetapan Kinerja (Lampiran 1 /5-6).

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 merupakan komitmen terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan seluruh Sasaran Strategis Tahunan yang dijalankan dalam bentuk program – program berikut kegiatan kerja yang telah melakukan Perubahan dan dijabarkan sesuai sasaran kinerja dan urutan penyusunan yang diupayakan secara skala prioritas.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan cakupan dari tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 14 Tahun 2016 yang meliputi tugas di Bidang Administratif Kesekretariatan, Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana di Kota Sawahlunto.

Keseluruhan Perjanjian Kinerja Perubahan disusun untuk dilaksanakan berjumlah 5 Program yang diuraikan dalam 11 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan yang merupakan tekad yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2021 ini.

2. SARAN

Seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Perjanjian Kinerja, harus berdasarkan urutan skala prioritas. Untuk itu disusun jadwal waktu kegiatan yang memperhitungkan target kinerja yang telah direncanakan dan memperhatikan kondisi perkembangan daerah yang terjadi dalam tahun 2021. Agar Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 ini dapat secara konsisten terlaksana sesuai target waktu yang telah ditetapkan dibutuhkan tekad dan pengawasan manajemen dan evaluasi secara periodik , sehingga pencapaian hasil terukur secara nyata.

Demikian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 ini kami sampaikan semoga menjadi pedoman untuk pelaksanaan Program dan kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 190003 1 003



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADRI YUSMAN.S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERI ASTA, SH**

Jabatan : Walikota Sawahlunto

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

DERI ASTA, SH

ADRI YUSMANI.S.Sos, MM
NIP. 19700812 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran : Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan	Persentase Masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan	100%
		Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi Bencana	100%
		Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	15%
2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	20%

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.982.747.600,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	10.467.228.730,00
3.	Program Koordinas Ketentraman dan Ketertiban Umum	698.067.000,00
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	49.190.200,00
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.206.960.424,00
Jumlah Anggggaran		16.404.193.954,00

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA,SH

SAWAHLUNTO, NOVEMBER 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN.S.SoS.MM
NIP.19700812 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perubahan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

ADRI YUSMAN S.Sos.MM
NIP.19700812 199003 1 003

PIHAK PERTAMA,

Ir. YULIANTI
NIP. 19670707 199401 2 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON III
 Tahun Anggaran

: SEKRETARIS BADAN
 : Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Umum dan Kepegawaian	12 bulan
		Jumlah Dokumen laporan keuangan yang berkualitas baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan sesuai aturan yang berlaku	3 dokumen

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.982.747.600,00
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,970,000.00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285,452,730.00
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209,455,320.00
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,593,950.00
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.648.400,00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.231.627.200,00
Jumlah Anggaran		3.982.747.600,00

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN PBD
 KOTA SAWAHLUNTO**


ADRI YUSMAN S.SOS, MM
 NIP.19700812 199003 1 003

Sawahlunto, November 2021
SEKRETARIS BADAN


Ir. YULIANTI
 NIP.19670707 199401 2 003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ABDUL HILAM.SH**

Jabatan : Kasubag Administrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP.19670707 199401 2 003

PIHAK PERTAMA,

ABDUL HILAM.SH

NIP. 19651210 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV
Tahun Anggaran

: KASUBAG ADMINISTRASI UMUM
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	63 orang
		Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum dengan baik	12 bulan
		Tertindakannya Jasa Penunjang Operasional OPD	12 bulan
		Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan OPD	12 bulan

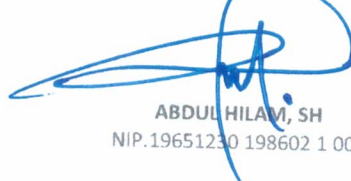
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,977,099,200
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,970,000
1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	10,000,000
1.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	39,970,000
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285,452,730
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	5,402,000
2.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85,505,730
2.3	Penyediaan bahan logistik kantor	21,740,000
2.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33,480,000
2.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,885,000
2.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	136,440,000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209,455,320
3.1	Penyediaan jasa surat menyurat	168,763,620
3.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,691,700
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,593,950
4.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	138,633,800
4.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	42,890,150
4.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	19,070,000
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,231,627,200
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,231,627,200
	Jumlah Anggaran	3,977,099,200

SEKRETARIS BADAN


Ir. YULIANTI

NIP.19670707 199401 2 003

Sawahlunto, November 2021
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM


ABDUL HILAM, SH
NIP.19651230 198602 1 002



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RICKY. SE**

Jabatan : Kasubag Administrasi Keuangan pada Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP.19670707 199401 2 003

PIHAK PERTAMA,

RICKY. SE

NIP. 19741107 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV
Tahun Anggaran

: KASUBAG ADMINISTRASI KEUANGAN
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan.	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang sesuai dengan pedoman dan tepat waktu	5 Dokumen

No.

Program/Kegiatan

Anggaran

SEKRETARIS BADAN



Ir. YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

Sawahlunto, November 2021
KASUBAG ADMINISTRASI KEUANGAN



RICKY, SE
NIP.19741107 200404 1 006



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOVINA. S.Sos**

Jabatan : Kasubag Program dan Pelaporan pada Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggu
langan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP.19670707 199401 2 003

PIHAK PERTAMA,

YOVINA.S.Sos

NIP. 19690918 199203 2 000

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ESELON IV
Tahun Anggaran

: KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan.	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik	1 Dokumen
		Jumlah dokumen pelaporan yang berkualitas baik	1 Dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang berkualitas baik	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.648.400
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.648.400
Jumlah Anggaran		5.648.400

SEKRETARIS BADAN



Ir. YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

Sawahlunto, November 2021

KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN



YOVINA S.SOS
NIP.19690918 199203 2 003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**

Jabatan : Kepala Bidang Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

ADRI YUSMAN S.Sos.MM
NIP.19700812 199003 1 003

PIHAK PERTAMA,

SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP. 19700323 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON III
Tahun Anggaran

: Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	20%
		Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan)	2
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang (orang)	80
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	3
		Terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama (bulan)	12
		Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (kegiatan)	12
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan)	12
		terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama (bulan)	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	49.190.200
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	
1. Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan	
1.1 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.190.200
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.206.960.424
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	
1. Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	
2.1 Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.206.960.424
Jumlah Anggaran	1.256.150.624

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS. MM
NIP.19700812 199003 1 003

SAWAHLUNTO, NOVEMBER 2021
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP.19700323 199403 1 003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASRINAL. SH**

Jabatan : Kasubid Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar
Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**

Jabatan : Kabid Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP. 19700323 199603 1 003

PIHAK PERTAMA,

ASRINAL. SH
NIP. 19730628 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV : Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga
Tahun Anggaran : Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	20%
		Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (kegiatan)	12
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan)	12
		terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama (bulan)	12

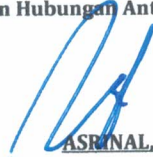
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.206.960.424
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	
1.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	1.206.960.424
1.1.	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	Jumlah Anggaran	1.206.960.424

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik


SUSILO HADI MARYANTO, SE
 NIP.19700323 199403 1 003

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021

Kasubid Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga


ASRINAL, SH
 NIP.19730628 200604 1 002



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DESI MARYA ASRA. SE.MM**

Jabatan : Kasubid Idiologi Wasbang dan Pembinaan Masyarakat
pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
ngan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSILO HADI MARYANTO. SE**

Jabatan : Kabid Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

SUSILO HADI MARYANTO. SE
NIP. 19700323 199603 1 003

PIHAK PERTAMA,

DESI MARYA ASRA. SE.MM
NIP. 19861201 200501 2 001

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV
Tahun Anggaran

: Kasubid Ideologi, Wasbang dan Pembinaan Masyarakat
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	20%
		Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan)	2
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang (orang)	80
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	3
		Terkoordinasinya kegiatan antar umat beragama (bulan)	12

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	49.190.200
1.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
1.1	1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.190.200
	Jumlah Anggaran	49.190.200

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik


SUSILO HADI MARYANTO, SE
 NIP.19700323 199403 1 003

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021

KASUBID IDEOLOGI, WASBANG DAN PEMBINAAN MASYARAKAT


DESI MARYA ASRA, SE, MM
 NIP.19861201 200501 2 001



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **DEDI SATRIA S.Sos**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan Logistik
pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2022

PIHAK KEDUA

ADRI YUSMAN S. SoS.MM
NIP.19700812 199003 1 003

PIHAK PERTAMA,

DEDI SATRIA.S.Sos
NIP. 19750723 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON III : : Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik Bencana
Tahun Anggaran : : Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Persentase masyarakat yang memahami kondisi kerawanan dan peran serta didalam Penanggulangan Bencana	85%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	238
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70%
		1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	70%
		2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	12
		3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	6
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12
		1 Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12
		2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanganan Covid-19	11
		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.217.026.210,00
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	70.530.150,00
1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	70.530.150,00
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	302.770.560,00
2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	53.322.400,00
2.2 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	0
2.3 penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0
2.4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	0
2.5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	58.867.400
2.6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	190.580.760
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	843.725.500
3.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	843.725.500
3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	0
2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	698.067.000,00
1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	698.067.000,00
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	698.067.000,00
Jumlah Anggaran	1.915.093.210,00

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

SAWAHLUNTO, Desember 2021
KABID PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN

DEDI SATRIA, S. Sos
NIP.19750723 200604 1 003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PRIMA YOGI MURPHI S.Pd**

Jabatan : Kasubid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana
Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEDI SATRIA.S.SoS**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan logis-
tik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggula
gan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

DEDI SATRIA.S.Sos
NIP. 19750723 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,

PRIMA YOGI MURPHI.S.Pd
NIP. 19860421 200001 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV
Tahun Anggaran

: Kasubid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan pra Bencana	Persentase masyarakat yang memahami kondisi kerawanan dan peran serta didalam penanggulangan Bencana	85%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	238
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	80
		1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	90%
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Kegiatan Penanganan Covid-19	11
		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	123.852.550,00
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	70.530.150,00
1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	70.530.150,00
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	53.322.400,00
2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	53.322.400,00
2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	698.067.000,00
1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	698.067.000,00
1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	698.067.000,00
Jumlah Anggaran	821.919.550,00

KABID PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAAN,
KEDARURATAN DAN LOGISTIK



DEDI SATRIA, S.Sos
NIP.19750723 200604 1 003

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021
KASUBID PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAAN



PRIMA YOGI MURPI, S.Pd
NIP. 19860421 201001 1 013



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADE YOS PUTRA. S.Sos**

Jabatan : Kasubid Kedaruratan dan logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEDI SATRIA.S.SOS**

Jabatan : Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Kedaruratan dan logistik pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

DEDI SATRIA S.Sos
NIP. 19750723 200604 1 003

PIHAK PERTAMA,

ADE YOS PUTRA.S.SoS
NIP. 19791224 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV
Tahun Anggaran

: Kasubid Kedaruratan dan Logistik
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota Dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan Bencana	70%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6
		1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	12
		2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	65%
		2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

1. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	249.448.160
1.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	58.867.400
1.2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	190.580.760
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	843.725.500
2.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	843.725.500
2.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	-
Jumlah Anggaran	1.093.173.660

**KABID PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAAN,
KEDARURATAN DAN LOGISTIK**



DEDI SATRIA, S. Sos
NIP.19750723 200604 1 003

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021
KASUBID KEDARURATAN DAN LOGISTIK



ADE YOS PUTRA, S. Sos
NIP. 19791224 200701 1003



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADRI YUSMAN.S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

ADRI YUSMAN S.Sos.MM
NIP.19700812 199003 1 003

TRI DARMA SATRIA. ST
NIP. 19770129 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON III PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO**

**ESELON III
Tahun Anggaran**

**: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
: Perubahan Anggaran 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase fasilitas umum diperbaiki	60%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1,12
		1. Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	1,20

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penanggulangan Bencana	9.250.202.520,00
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9.250.202.520,00
1.1	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	9.250.202.520,00
Jumlah Anggaran		9.250.202.520,00

**KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO**


**ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003**

**SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021
KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**


**TRI DARMA SATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004**



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HEMILSON ADRI. ST**

Jabatan : Kasubid Rekonstruksi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Kesa -
tuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

TRI DARMA SATRIA. ST
NIP. 19770129 200701 1 004

PIHAK PERTAMA,

HEMILSON ADRI. ST
NIP. 19800310 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV
Tahun Anggaran

: Kepala Sub Bidang Rekonstruksi
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase fasilitas umum diperbaiki	60%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1,30
		1. Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	1,12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Penanggulangan Bencana	
1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9.250.202.520,00
1.1 Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	9.250.202.520,00
Jumlah Anggaran	9.250.202.520,00

KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI


TRI DARMA SATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021

KASUBID REKONSTRUKSI


HELMISON ADRI, ST
19800310201001 1018



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, , Kode Pos 27424

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JEKI RUSANDA. ST**

Jabatan : Kasubid Rehabilitasi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Penamggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRI DARMA SATRIA. ST**

Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2021

PIHAK KEDUA

TRI DARMA SATRIA. ST
NIP. 19770129 200701 1 004

PIHAK PERTAMA,

JEKI RUSANDA. ST
NIP. 19740504 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KESBANGPOL DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO

ESELON IV
Tahun Anggaran

: Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
: Perubahan Anggaran 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase fasilitas umum diperbaiki	60%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

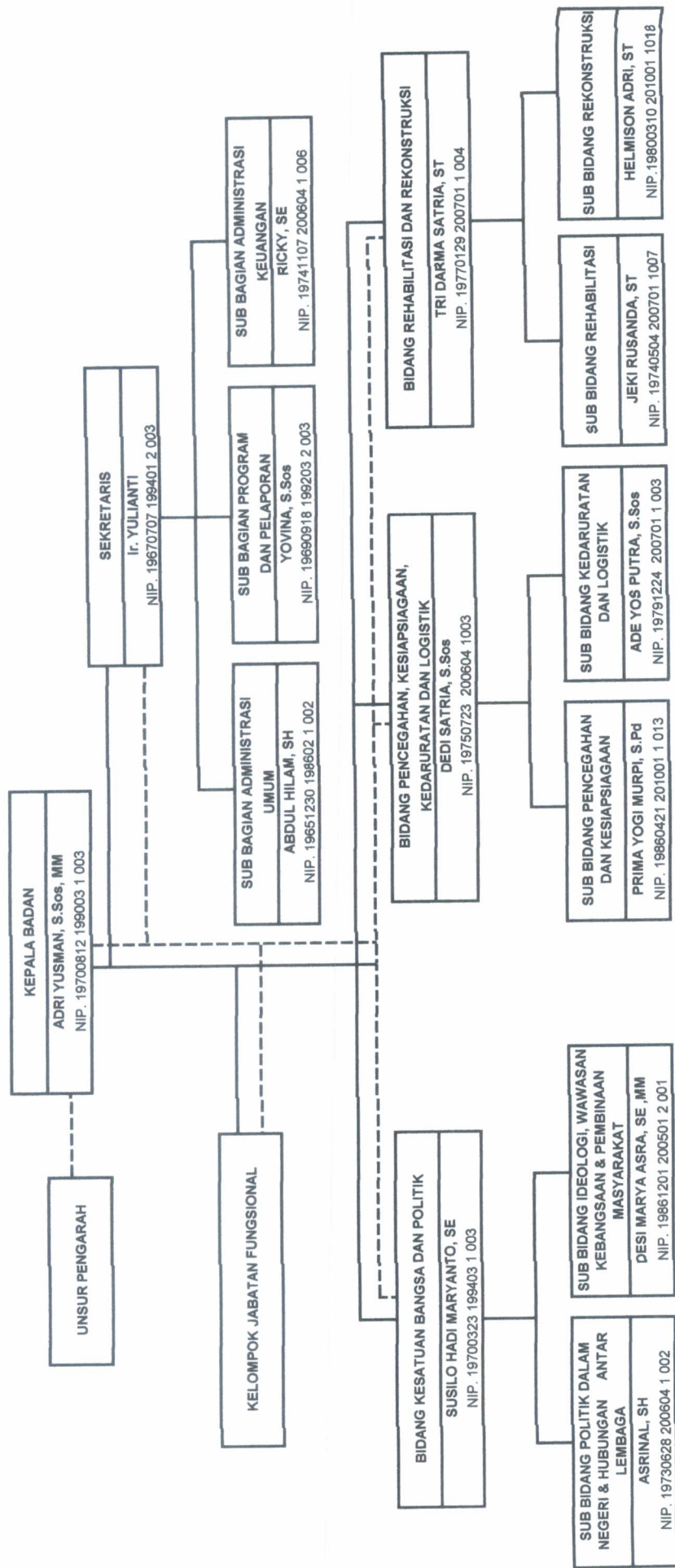

TRI DARMA SATRIA, ST
NIP.19770129 200701 1004

SAWAHLUNTO, DESEMBER 2021
KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI


IEKI RUSANDA, ST
NIP.19740504 200701 1007

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KETERANGAN :
 _____ = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA		
					4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	19,070,000,00
						2 Output (Keluaran) Terbaiknya peralatan kantor yang rusak	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak	Bulan	12
				5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	5,648,400,00
						2 Output (Keluaran) Penyusunan dokumen perencanaan	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Dokumen perencanaan perangkat daerah	Bulan	12
				6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp.	3,231,627,200,00
						2 Output (Keluaran) Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12
Jumlah Anggaran								
15.706.156.954,00								

Sawahlunto, November 2021
**KEPALA BADAN KESBANGPOL
DAN PBD KOTA SAWAHLUNTO**

ADRIYUSMAN, S.Sos.MM
NIP. 19700812 199003 1 003

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA		
			3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	168.763.620,00
						2 Output (Keluaran) Pembayaran honorarium Caraka, pengirim surat/laporan dinas dan tersedianya material 3000 dan 6000 setiap bulannya	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Tersedianya material dan paket pengiriman dan benda pos lainnya	Bulan	12
					3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	40.691.700,00
						2 Output (Keluaran) Terfasilitasinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Lancarnya penggunaan telepon, air dan listrik setiap bulan selama satu tahun	Bulan	12
			4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	138.663.800,00
						2 Output (Keluaran) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Bulan	12
						3 Outcome (Hasil) Kendaraan dinas berfungsi dengan baik	Bulan	12
					4.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	42.890.150,00
						2 Output (Keluaran) Jumlah bangunan kantor yang dipelihara	Unit	1
						3 Outcome (Hasil) Terpelihara dan terawatnya bangunan kantor	Unit	1

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA			
					2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	85.505.730,00
							2 Output (Keluaran) Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	1
							3 Outcome (Hasil) Bertambahnya Inventaris kantor	Unit	1
					2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	21.740.000,00
							2 Output (Keluaran) Pembelian LPG	Bulan	12
							3 Outcome (Hasil) Terpenuhi LPG untuk kantor	Bulan	12
					2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	33.480.000,00
							2 Output (Keluaran) Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Bulan	12
							3 Outcpme (Hasil) Terpenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12
					2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	2.885.000,00
							2 Output (Keluaran) Tersedianya bahan bacaan media masa	Bulan	12
							3 Outcome (Hasil) Tersedianya reverensi informasi dari media masa	Bulan	12
					2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	136.440.000,00
							2 Output (Keluaran) Pembayaran biaya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan	Bulan	12
							3 Outcome (Hasil) Terpenuhi rapat keluar kota dan luar provinsi	Bulan	12

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA			
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar	II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	1.206.960.424,00	
						2 Output (Keluaran) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan			
						3 Outcome (Hasil) Kegiatan berjalan dengan lancar dan masyarakat lebih memahami bahaya narkoba serta kehidupan yang damai antar umat beragama			
				IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	10.000.000,00
							2 Output (Keluaran) Pengadaan pakailan dinas beserta atributnya		
							3 Outcome (Hasil) Tersedianya pakailan dinas lengkap dengan atributnya		
		1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	39.970.000,00				
			2 Output (Keluaran) Pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana						
			3 Outcome (Hasil) Meningkatnya kapasitas aparatur						
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Input (Masukan) Jumlah Dana	Rp	5.402.000,00			
				2 Output (Keluaran) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
				3 Outcome (Hasil) Terpenuhinya standar penerangan bangunan kantor					

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA		
		Persentase Fasum yang Tertangani pada saat Pasca Bencana	15%	3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.4 Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Kondisi pasca bencana yang terkendali 3 Outcome (Hasil) Situasi setelah bencana terkendali	Rp.	9.250.202.520,00
					3.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 3 Outcome (Hasil) Korban bencana dapat dievakuasi secara cepat dan tepat	Rp.	843.725.500,00
					3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Jumlah logistik yang tersedia 3 Outcome (Hasil) Terbantu logistik masyarakat yang terdampak bencana	Rp	12
							Bulan	12
2	Terwujudnya Kefenteran dan Keterliban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Keterlibatan dan Keterliban di Kota Sawahlunto	60%	II PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
					1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Penyusunan program kerja 3 Outcome (Hasil) Pekerjaan berjalan sesuai prosedur	Rp	49.190.200,00
							Bulan	12
							Bulan	12

RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021

NO	SASARAN		RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN		SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA		
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Terlayani Informasi Kebencanaan	70%	1 Program Penanggulangan Bencana	1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Dilaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana Outcome (Hasil) Masyarakat mengetahui wilayah rawan bencana	Rp.	70.530.150,00
		Persentase Masyarakat yang Terlayani Pada Saat Terjadi Bencana	50%	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 3 Outcome (Hasil) Peserta memahami tentang pencegahan bencana	Rp.	53.322.400,00
					2.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Jumlah sarana prasarana yang tersedia 3 Outcome (Hasil) Sarana prasarana kesiapsiagaan yang bertambah	Rp.	58.867.400,00
					2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Input (Masukan) Jumlah Dana 2 Output (Keluaran) Peralatan yang tersedia 3 Outcome (Hasil) Peralatan perlindungan yang memadai	Rp.	190.580.760,00

a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI,dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	--	598.067.000,00
II	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,274,228,500.00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,648,400.00	5.648.400,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,268,580,100.00	231.627.000,00
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	156,340,190.00	
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	156,340,190.00	49.190.200,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1,267,768,424.00	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umar Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,267,768,424.00	206.960.424,00
TOTAL BELANJA		17,437,753,139.00	104.193.954,00

Sawahlunto, November 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Sawahlunto



ADRIYUSMAN, S.Sos, MM
NIP. 19700812 199003 1 003

KURANG

3072	11
4417	11
2557	4
4588	5
14534	21

**DAFTAR : LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN ANGGARAN 2021**

**OPD : BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO**

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	DPA 2021 (Rp)	DPA PERUB 2021 (Rp)
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	768.499.440,	745.472.000
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10,000,000.00	10.000.000,00
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,500,000.00	39.970.000,00
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,402,000.00	5.402.000,00
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,271,130.00	85.505.730,00
c.	Penyediaan bahan Logistik Kantor	21,740,000.00	21.740.000,00
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,480,000.00	33.480.000,00
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,885,000.00	2.885.000,00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121,380,000.00	136.440.000,00
1.3	Penyediaan Jasa Penujng Urusan Pemerintahan Daerah		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187,413,360.00	168.763.620,00
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,804,000.00	40.691.700,00
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138,663,800.00	138.663.800,00
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,890,150.00	42.890.150,00
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,070,000.00	19.070.000,00
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	12,739,416,025.00	
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	70,530,150.00	70.530.150,00
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	64,197,400.00	53.322.400,00
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	96,900,000.00	58.867.400,00
c.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	174,410,760.00	190.580.760,00
d.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	11,408,601,120.00	250.202.520,00
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		